



JURNAL BASICEDU

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2022 Halaman 6580 - 6590

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Liberalisme Pendidikan dan Wacana *Link and Match* Sekolah Kejuruan di Indonesia

Hayu Mentari Precalya

Universitas Indonesia, Indonesia

E-mail: hayumentaripre@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan penelitian untuk mengalisis secara kritis mengenai wacana *link and match* sekolah kejuruan dengan liberalism pendidikan. Fokus studi ini mengkaji kesesuaian liberalisme dalam pendidikan dengan kebijakan-kebijakan *link and match* yang diberlakukan di sekolah kejuruan. Penelitian ini menggunakan analisa teori kritis dari tokoh pendidikan kritis sosiologi untuk menjelaskan liberalism pendidikan dalam wacana-wacana *link and match* sekolah kejuruan di Indonesia. Studi menggunakan pendekatan *critical discourse analysis*. Kebanyakan kajian *link and match* pendidikan membahas mengenai efektivitas kebijakan serta dampaknya bagi peserta didik, namun dalam artikel ini akan melihat *Critical Discourse link and match* sekolah kejuruan dan liberalisme pendidikan di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana liberalism pendidikan dalam wacana *link and match* sekolah kejuruan di Indonesia. Program-program yang disusun dalam kebijakan *link and match* didasarkan pada persyaratan dunia industrialisasi dan perubahan teknologi. Atas dasar ini wacana kebijakan *link and match* menjelaskan hubungan negara, pendidikan, dan dunia usaha yang mengarah pada ideologi yang ditanamkan dan keuntungan ekonomi yang didapatkan.

Kata Kunci: Ideologi, Neoliberalisme, *Link and Match*, Kurikulum, Indonesia.

Abstract

The aim of this research is to critically analyze the discourse of link and match vocational schools with educational liberalism. The focus of this study examines the suitability of liberalism in education with the link and match policies implemented in vocational schools. This study uses critical theory analysis from sociological critical education figures to explain educational liberalism in link and match discourses in vocational schools in Indonesia. The study uses a critical discourse analysis approach. Most educational link and match studies discuss the effectiveness of policies and their impact on students, but in this article we will look at the Critical Discourse link and match of vocational schools and educational liberalism in Indonesia. The results in this study illustrate how educational liberalism is in the discourse of link and match vocational schools in Indonesia. The programs arranged in the link and match policy are based on the requirements of the world of industrialization and technological change. On this basis, the link and match policy discourse explains the relationship between the state, education, and the business world which leads to the ideology that is implanted and the economic benefits obtained.

Keywords: Ideology, Neoliberalism, *Link and Match*, Curriculum, Indonesia.

Copyright (c) 2022 Hayu Mentari Precalya

✉ Corresponding author :

Email : hayumentaripre@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3310>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 6 No 4 Tahun 2022
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Ruang lingkup dan luasnya hubungan antara praktik pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional telah menjadi fokus perhatian utama. Tulisan ini akan melihat lebih dalam hubungan liberalism pendidikan dengan praktik pendidikan dan kebijakan pendidikan pada sekolah kejuruan Jones, (2015);Martono, (2017);DARMADI & Pd, (2019). Dalam sistem pendidikan di Indonesia sangat memperhatikan hubungan antara praktik pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional yang memuat kompetensi untuk lulusan, standar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Dari aspek-aspek ini tentunya banyak kebijakan pendidikan yang dibuat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, salah satu kebijakan itu adalah *link and match* pada dunia pendidikan (Disas, 2018).

Program *link and match* diterapkan dari tahun 1989, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menghubungkan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (Precalya, 2021). *Link and match* sebagai salah satu upaya dunia pendidikan untuk mencegah terjadinya *mismatch* antara *supply* yang disediakan Lembaga Pendidikan dan *demand* pada kebutuhan dunia kerja (Putranto, 2017). *Link and match* dunia pendidikan dan industri diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi untuk menyelaraskan sistem pendidikan menengah ke atas yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Namun ternyata kebijakan *link and match* sudah berjalan *lama* belum terlihat hasil sebagaimana yang diharapkan (Diana, Irawan, & Meilvinasvita, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, dilihat dari data pendidikan yang telah diluluskan, dari 9,77 juta pengangguran terbuka, 13,55% lulusan SMK, 9,86% lulusan SMA, 8,08% lulusan diploma, 7,35 persen lulusan universitas, 6,46% lulusan SMP, dan 3,61% lulusan SD (Statistik, 2020). Terjadi penambahan jumlah pengangguran yang diakibatkan pandemi Covid-19 2,67 juta atau 1,84% jika kita membandingkan dengan Agustus 2019. Pada Februari 2018, jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai 8,92%, kemudian jumlah ini turun menjadi 8,63% pada Februari 2019. Data ini menunjukkan tidak terjadi *link and match* antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. Justru sebaliknya, SMK sebagai target kebijakan *link and match* pada kenyataan menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Pengadaan jumlah SMK di Indonesia terus ditingkatkan, namun tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas dari SMK itu sendiri. Ini dibuktikan dengan masih kurangnya referensi buku-buku di SMK sebagai acuan belajar siswa dan kurangnya juga tenaga guru sebagai agen yang mentransfer pengetahuan. Pada tahun 2009, dari 144 bidang keahlian dalam SMK, kekurangan guru sekitar 34.000 orang (Hartutik, Muawanah, & Suswati, 2019). Akibatnya kualitas peserta didik SMK menjadi menurun, hingga berujung banyaknya jumlah pengangguran lulusan SMK. Hal ini menunjukkan antara rancangan program yang dibuat dengan kenyataan dilapangan belum diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah.

Tabel 1. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tamatan Pendidikan

Pendidikan Tertinggi Yang Diselesaikan + Totalnya	Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Diselesaikan (Orang)					
	2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Tidak/Belum Pernah Sekolah	36.422	40.771	35.765	31.379	20.461	23.905
Tidak/Belum Pernah Tamat SD	443.495	347.712	346.778	428.813	342.734	431.329
SD	965.641	865.778	1.006.744	1.410.537	1.219.494	1.393.492
SLTP	1.235.199	1.137.195	1.251.352	1.621.518	1.515.089	1.604.448
SLTA Umum/SMU	1.690.527	2.008.035	1.748.834	2.662.444	2.305.093	2.472.859

Pendidikan Tertinggi Yang Diselesaikan + Totalnya	Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Diselesaikan (Orang)					
	2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SLTA Kejuruan/ SMK	1.397.281	1.739.625	1.443.522	2.326.599	2.089.137	2.111.338
Akademi/Diploma	274.377	218.954	267.583	305.261	254.457	216.024
Universitas	855.854	746.354	824.912	981.203	999.543	848.657
Total	6.898.796	7.104.424	6.925.486	9.767.754	8.746.008	9.102.052

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sistem kontrol dominasi elit pada *link and match* pendidikan yang diterapkan melalui kurikulum sekolah, menunjukkan adanya keterkaitan pada dunia pendidikan dan dunia kerja yang telah terakomodasi oleh elit semenjak Orde Baru. Pencetusan pembangunan nasional pada masa Orde Baru, bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 (SAFITRI, 2016). Ini diatur dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dan dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun). Pelaksanaan Repelita sendiri dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan kedua adalah Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang, yaitu bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Hal ini memperkuat keterkaitan dunia pendidikan dan dunia kerja, karena pembangunan tidak hanya membutuhkan modal dan sarana-sarana tetapi juga membutuhkan tenaga yang terampil untuk melaksanakan pembangunan (Rosyid, Mansyur, IP, & Abdullah, 2019). Kemudian keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja diperjelas dengan diekluarkannya kebijakan *link and match*. Gagasan *link and match* ini merupakan keterkaitan antara kebutuhan masa depan masyarakat Indonesia yang cenderung mengarah pada ranah ekonomi, dengan berprinsip kekuasaan yang mendominasi dan merubah hakikat dan tujuan dari pendidikan.

Melihat kondisi yang demikian, kritik pendidikan menjadi hal yang penting dalam struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah sebagai institusi pendidikan, hadir bukan sebagai sarana pembuka wawasan pengetahuan namun sebagai lembaga pelatihan, penyelamat, tempat rehabilitasi yang dibalut dengan kurikulum dan konsep pendidikan untuk dikomodifikasi dalam era industri Rosyid et al., (2019);(Budiharto, Triyono, & Suparman, (2018). Analisis melalui pendekatan kritis menjadi mediasi dan pembentukan kesadaran individu dalam masyarakat tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kritik pendidikan dapat menjadi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pelestarian sekolah menciptakan kembali bentuk-bentuk kesadaran yang memungkinkan kontrol sosial dipertahankan tanpa keharusan kelompok dominan harus menggunakan mekanisme dominasi yang terbuka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis wacana kritis Sholikhati & Mardikantoro, (2017);Rahardjo, (2018)Kholifah & Suyadnya, (2018). Pendekatan kualitatif berfokus telaah pada makna-makna subjektif, pengertian-pengertian, metaphor-metafor, symbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi pada suatu kasus spesifik yang hendak diteliti. Pendekatan ini dipilih agar dalam studi memperoleh gambaran detail dan mendalam mengenai informasi gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Objek kajian penelitian ini adalah teks wacana yang berkaitan dengan *link and match* di Indonesia, itu berarti penelitian ini bersifat tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Liberalisme Pendidikan

Neoliberalisme pendidikan yang berkembang saat ini, lebih memperhatikan pada teknologi tinggi, teknologi industri dan informasi, dan layanan ekonomi (Arliman, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan neoliberalisme mengutamakan sumber daya manusia sebagai fokus utama untuk menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Sejarah neoliberalisme pendidikan bermula dari pertemuan pasca perang dunia ke-2 yang dikenal dengan pertemuan *Bretton Woods*, pertemuan ini dilatarbelakangi pasca perang dunia ke-2 banyaknya negara-negara dunia kesulitan ekonomi karena kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pertemuan ini dihadiri 44 negara yang berasal dari Amerika. Pada pertemuan ini Amerika menawarkan proposal deregulasi dan pereduksian peran pemerintah, yang sering dikatakan dengan nama liberalisasi bidang jasa (Zulaeha, 2020). Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membuat perjanjian GATS (*General Agreement On Trade In Services*) (Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa). Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian ini negara-negara yang ikut setuju melakukan liberalisasi bidang jasa, yaitu dalam bidang perdagangan, agrikultur, kekayaan intelektual dan pendidikan. GATS ini menjadi dasar badan dagang internasional WTO (*World Trade Organization*). GATS sendiri merupakan organisasi yang mengatur mengenai tata cara, transaksi, tarif dan skema perdagangan antara negara-negara anggota (Zulaeha, 2020).

GATS mengintegrasikan regulasi nasional sebagai bagian dari proses liberalisasi yang ditempuh negara anggota. Tujuan pokoknya adalah agar negara-negara membuat atau mengembangkan aturan-aturan domestik yang ramah pasar, tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu (*unnecessary barriers*) bagi perdagangan jasa. Berbagai macam dampak yang dirasakan tergantung pada lokasinya di arena global, dapat membuka peluang atau menguntungkan tetapi dapat juga merupakan hambatan atau merugikan sektor pendidikan negara berkembang. WTO dan GATS memang tidak secara langsung menyatakan penarikan tanggung jawab pemerintah untuk dunia pendidikan. Namun, dilihat dari pola dan strategi implementasi, serta dilihat globalisasi dan ideologi yang berada dibelakangnya terlihat bahwa peran negara dalam memenuhi tanggung-jawab atas dunia pendidikan telah ditarik.

GATS menempatkan pendidikan dibebaskan, dimana pendidikan sebagai pasar yang pembeli dan penjualnya terbuka. GATS mengunci negara kedalam sistem aturan yang berarti secara efektif tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengubah kebijakan. Artinya negara secara tidak langsung mendukung kebijakan yang diambil oleh GATS, jika tidak bagi pemilih berhak untuk memilih pemerintahan baru yang memiliki kebijakan berbeda (Xu & Kan, 2013).

Tidak hanya sampai pada pembentukan GATS, neoliberalisme juga dilegalkan dengan dibentuknya Global Education Reform Movement (GERM). GERM sendiri merupakan gerakan reformasi pendidikan di berbagai negara-negara di dunia sebagai perubahan dari paradigma pembangunan pada tahun 1980 (Resistensi Finlandia Terhadap Global Educational Reform Movement, 2015). Dengan peran institusi pembangunan internasional, seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF, gerakan GERM menjadi ortodoksi kebijakan pendidikan di berbagai negara-negara di dunia. Reformasi neoliberalisme pendidikan kemudian banyak dilakukan di berbagai negara terutama negara Anglo-Saxon (Inggris, Australia, dan Selandia Baru). Reformasi ini menekankan perubahan dalam pengelolaan sektor pendidikan menjadi lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan sektor Industri yang dihasilkan pendidikan).

Indonesia sendiri mulai aktif menjadi anggota GATS sejak tahun 1994, ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) Agreement Establishing the World Trade Organization (Idrus, 2006). Sejalan dengan ini, Indonesia melakukan revisi bidang pendidikan agar sejalan dengan tujuan dari WTO dan GATS. Kurikulum dan konsep pendidikan menjadi poin penting dalam penyelarasan dengan ideologi WTO dan GATS. Kebijakan *link and match* pendidikan menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan selaras dengan tujuan-tujuan GATS. Adanya Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2, yang menjelaskan mengenai instruksi untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tenaga siap kerja. Ini juga yang menjadi dasar perancangan kebijakan *link and match* selanjutnya. Kemudian pada tahun 1993 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Abdul Latif, mencetuskan *link and match* sebagai program yang dibertuk bersama. *Link and match* bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja mandiri. *Link and match* terus dipakai, direvisi, dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>).

Neoliberalisme pendidikan akan mengubah identitas pendidikan menjadi menganggap pendidikan sebagai pemaksimum keuntungan. Kecenderungan *link and match* dengan neoliberalisme pendidikan membuat sekolah kejuruan hanya memiliki fokus ekonomi saja. *Link and match* penekanannya lebih kepada hubungan pendidikan dengan dunia industri, pendidikan harus menciptakan manusia siap pakai bagi industri. Sehingga diciptakannya kebijakan-kebijakan pendorong untuk melegalkan keberlangsungan *link and match* pada dunia pendidikan. Artinya, pendidikan hanya membentuk manusia patuh dalam menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang telah disusun, tanpa mempertanyakan tujuan dari pembelajaran yang ditempuh. Pendidikan disempitkan untuk memenuhi kepentingan industri dan pasar kerja. Kepatuhan tenaga kerja dihargai lebih tinggi dari kreativitas dan inovasi. Sedangkan pembentukan kompetisi juga dihargai lebih tinggi, dari pada kerjasama yang berpijak pada solidaritas (Giroux, 2011).

Tabel 2. Kecenderungan *Link And Match* pada Sekolah Kejuruan dengan Neoliberalisme

Program	Arah Program
Mengurangi Pengangguran	Relevansi pendidikan dengan industri kerja sehingga menghasilkan lulusan siap pakai pada dunia kerja
Kompetensi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - SMK sebagai satuan pendidikan diarahkan pemenuh kebutuhan dunia kerja - SMK memberikan pembelajaran untuk mencapai kompetensi disyaratkan oleh dunia kerja, dan juga sains dasar untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan masa depan (Puskurbuk, 2011)
Pendidikan Sistem Ganda	Praktek kerja industri/praktek kerja lapangan, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di industri oleh SMK
Kurikulum	Harus sesuai dengan kebutuhan industri, teknologi dan informasi, pembangunan nasional, dan perkembangan zaman.
Standar Lulusan	Ukuran keterampilan lulusan SMK disesuaikan dengan kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Sumber: Berbagai Sumber Bacaan Peneliti, 2022

Penerapan *link and match* yang lebih mengarah pada dunia ekonomi, menyadarkan kita bahwa pendidikan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi namun ada hal luas dan kompleks tujuan pendidikan yang harus dicapai. Sistem kontrol dominasi elit pada *link and match* pendidikan yang diterapkan pada kurikulum sekolah kejuruan menunjukkan sifat kekuasaan yang membatasi hakikat sekolah sebagai agen transfer pengetahuan. Kekuasaan yang dipegang oleh dominasi elit menciptakan wacana yang dapat memberikan pengaruh pada praktik sosial dalam pendidikan. Kekuasaan juga menghasilkan pengetahuan yang dianaut dan dipaksakan pada struktur dan sistem pendidikan. Tidak ada relasi kekuasaan tanpa konstitusi korelatif yang berhubungan dengan pengetahuan; atau pengetahuan akan membentuk hubungan kekuasaan diwaktu yang sama (Darmaningtyas, 2014). Pendidikan hakikatnya memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu

membuka wawasan tentang dunia yang lebih luas, mengajarkan penalaran yang logis membangun kepercayaan diri yang kuat sebagai individu maupun bangsa, menumbuhkan kemandirian dalam bersikap, memanusiakan manusia (driyarkara) atau dalam terminology Ki Hadjar Dewantara adalah menumbuhkan manusia merdeka dan berbudaya. Dengan memaknai tujuan pendidikan yang lebih luas, maka praksis pendidikan nasional tidak terjebak pada simplifikasi yang dibuat oleh kekuatan capital global, yang sekedar memberikan kompetensi tertentu agar mampu berkompetisi di tingkat global. Doktrin bahwa pendidikan yang baik adalah yang mampu menghantarkan lulusanya bersaing ditingkat global merupakan bukti dari suatu sistem pendidikan yang amat terkontaminasi oleh ideologi pasar bebas atau kapitalisme (Darmaningtyas, 2014, pp. 37-39).

Link and Match Sekolah Kejuruan

Konsep *link and match* bukanlah merupakan konsep baru dalam dunia pendidikan. Sejak awal abad ke-20, dalam teori pembelajaran *behavioral* merupakan refleksi dari konsep *link and match*. Kemudian konsep *behavioral* dikenal dengan pembelajaran *learning by doing* (Husein, 2019). Teori pembelajaran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghendaki agar proses belajar berjalan dengan melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Dengan teori belajar demikian diharapkan seseorang dapat memiliki pengalaman aktual, empirik dan nyata dalam proses belajarnya. Jika proses pembelajaran kita memperoleh pengalaman nyata dan aktual, dalam hakekatnya proses itu dapat dikatakan mencerminkan keadaan *link and match*. (Johan, Slamet, & Widodo, 2019).

Tabel 3. Alur Struktur Terbentuknya Sekolah Kejuruan dan *Link and Match*

Tahun	Keterangan
1737-1755	Zaman kekuasaan VOC, didirikan sekolah vokasi pertama yaitu akademi pelayaran
1853	Membuka Kembali sekolah vokasi oleh belanda, Bernama <i>Ambachts School van Soerabaja</i>
1940-1945	Pada masa penjajahan Jepang semua yg berhubungan dengan Belanda dihapuskan, termasuk sekolah. Kemudian didirikan lagi sekolah vokasi ini yaitu Sekolah Teknik Menengah (STM). Sekolah ini ada sampai Indonesia merdeka dan sudah memiliki siswa 360
1969	Dari awal penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pendidikan vokasi mulai mengikuti model pendidikan dari negara luar. Pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia diawali Repelita V, melalui ditetapkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ditetapkannya juga PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang didalamnya berisikan beberapa ketentuan dalam pendidikan Vokasi. Dikeluarkannya juga Kepmendikbud No. 490/1992 tentang SMK melaksanakan pengembangan pada bagian produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran SMK.
1997	Kebijakan pengembangan SMK dilakukan lebih lanjut melalui penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui Konsep <i>Link and Match</i> , ini merupakan awal pelibatan dunia industri/usaha.

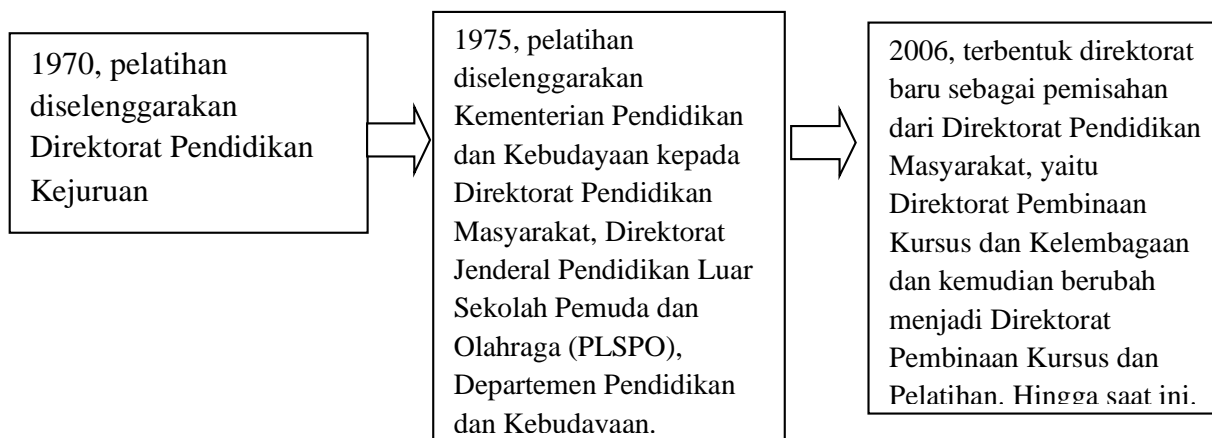
Sumber: Suyitno, (2020)

Secara jelasnya, sejarah *link and match* dicetuskan Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ing. Wardiman (Periode 1989-1998). Program *link and match* dipersiapkan untuk menjadi program bersama dunia pendidikan dengan dunia industri. Latar belakang terbentuknya *link and match* merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2 tentang mempersiapkan siswa sekolah kejuruan sebagai tenaga siap pakai. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro dan Menteri Tenaga

Kerja (Menaker) Abdul Latief menyampaikan kesepakatan dari dua kementerian ini untuk menghasilkan tenaga kerja mandiri dalam program kerja yang dibuat bersama (Oktaviani, 2017). *Link and match* dibuat sebagai penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dalam dunia industri ke depan. Pemberlakuan program link and match diharapkan dapat tidak lagi *supply minded* tapi lebih *demand minded* (kebutuhan pasar) (Oktaviani, 2017). Program *link and match* ditujukan untuk dua sasaran, yaitu pada tingkat sekolah menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Khusus untuk sekolah menengah, sasaran program pemerintah mengubah besaran kebutuhan pendidikan siswa SMA dan SMK 70:30, menjadi 30:70. Sementara pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan khusus. Tidak hanya itu, bahkan diharapkan juga melakukan kerjasama mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang dikembangkan (LIPI, 2009).

Sesuai dengan capaian yang diinginkan dari *link and match* dalam menjembatani dunia pendidikan dan ketenagakerjaan, maka dibentuklah landasan acuan yang kuat untuk penerapan *link and match*, yaitu UU No.20 Tahun 2003, UU No.3 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010, PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2015, PP No.41 Tahun 2015, PERPRES No.8 Tahun 2012, PERPRES No.29 Tahun 2015, KEPPRES No.121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.83/P Tahun 2016, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015. Dari landasan acuan sebagai dasar hukum *link and match* maka dibuatlah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016. Memiliki dasar undang-undang dan peraturan yang kuat membuat *link and match* semakin dikembangkan dalam program-program pendidikan kejuruan.

Implementasi tujuan dari *link and match* sebagai cara dalam menyikapi pasar bebas maka dikembangkan pelaksanaan pendidikan sistem ganda (psg). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pendidikan dengan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 (Wayong, 2017). *Link and match* mengadopsi model *Dual System* dari negara Jerman, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Secara teoritis, PSG merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK, dengan penerapan praktik peserta didik di industri (Suyitno, 2020). Berbagai kegiatan dilakukan SMK untuk melibatkan dunia industri/usaha kedalam dunia pendidikan.



Gambar 1. Alur Program Pelatihan Sekolah Kejuruan
 (Sumber: Suyitno, 2020)

Penerapan kebijakan pendidikan sistem ganda (PSG) menjelaskan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya (*schooling system*) menjadi sistem ganda (*dual responsibility*), dimana Pendidikan sistem ganda adalah bentuk kerjasama pada satuan pendidikan dengan industri, dan juga

kerjasama dengan elit kepentingan lain (Puskurbuk, 2011). Program pendidikan sistem ganda pengelolaannya sesuai dengan *link and match*, ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan harapan program ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran usia muda. Dikeluarkannya Pemenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017, tentang pedoman pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link dan Match* dengan Industri. Dikeluarkannya peraturan ini juga sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan bagi SMK dalam membangun dan menyelenggarakan sekolah kejuruan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah dengan sistem pembelajaran biasa ke sekolah dengan berbasis sistem pendidikan ganda yang sesuai dengan *link and match*. Pembelajaran akan dilaksanakan pada dua tempat yaitu sekolah dan industri. Arah pembelajaran mengacu pada sebagian program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di industri, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip (Wayong, 2017, p. 381). Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi *link and match* terus dikembangkan dan diinovasi sesuai dengan kebutuhan industri kerja.

Wacana *Link and Match* Sekolah Kejuruan dalam Liberalisme Pendidikan

Kecenderungan *link and match* terhadap dunia industri dan pasar kerja sejak awal pembentukannya membuat *link and match* dibuat untuk mendukung pendidikan liberalisme yang melahirkan reproduksi pembagian kerja dan berkontribusi dalam penanaman hegemoni ideologi. Pengetahuan tidak pernah netral dan empiris, hubungan *objektif* dengan yang nyata. Pengetahuan adalah kekuatan, dan sirkulasi pengetahuan adalah bagian dari distribusi kekuasaan sosial (A'isyah, 2017). Apple melihat pasar sebagai elemen yang sangat determinan dalam menggerakkan pendidikan, khususnya menganalisis kurikulum (Latif, 2020). Dalam tulisan ini melihat *link and match* yang dimuat dalam kurikulum pendidikan merupakan representasi dari hubungan relasi yang diciptakan oleh dunia pendidikan dan industri kapitalis. Adanya wacana dominasi yang mempengaruhi praktik *link and match* dalam kurikulum pendidikan kejuruan, ini dilihat dari konteks kompetensi pembelajaran, program pembelajaran, target yang dicapai lulus yang dimuat dalam kurikulum pendidikan kejuruan.

Penekanan tujuan sekolah kejuruan terhadap dunia kerja membuat kompetensi yang dibentuk dalam sekolah kejuruan harus efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan siap pakai dalam dunia kerja. Berikut merupakan kompetensi kurikulum yang memuat *link and match* pendidikan.

Tabel 4. Muatan *Link and Match* Pendidikan dalam Kompetensi Kurikulum

Kurikulum	Kompetensi
Kurikulum 1994	Kurikulum ini disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kebutuhan lingkungan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesenian. Kurikulum juga sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan (pasal 37 UUSPN)
Kurikulum Berbasis Kompetensi	Kurikulum ini dibuat untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, dan juga sebagai pelengkap dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTSP	Kurikulum ini mengarah pada standar nasional pendidikan. Kurikulum ini juga untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penyusunan program pendidikan kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah

Kurikulum 2013	Kurikulum ini dilatar belakangi untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kurikulum Merdeka	Menyempurnakan kurikulum yang lain, konsep kurikulum merdeka berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jumlah bidang keahlian menjadi 10 dan 50 bidang keahlian.

Sumber : berbagai sumber bacaan penulis, 2022

Kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 1994 hingga kurikulum merdeka, tahun 2022 mengacu pada tujuan pokok pendidikan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Artinya kompetensi dalam kurikulum memiliki kontrol sosial yang dipertahankan, dengan mengendalikan dan mendiferensiasi kurikulum sekolah, maka individu-individu dan kelas-kelas dapat dikontrol dan terdiferensiasi (Apple M. W., 1990). Dalam kurikulum pendidikan kejuruan, lulusan kejuruan harus memiliki orientasi dapat diterima dalam dunia kerja. Hal ini membuat pengembangan kompetensi pada kejuruan menuntut siap kerja dan siap pakai. Arah sekolah kejuruan seperti ini terlalu berorientasi pada pendidikan melayani persaingan global daripada memperhatikan aspek keterampilan khusus sesuai bakat dan minat.

Struktur kurikulum sekolah kejuruan dibagi menjadi 3 komponen dan diberikan selama 3 tahun belajar di SMK. Komponen pertama, adalah komponen normatif yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kehidupan. Komponen kedua, adalah komponen adaptif, yaitu kompetensi peserta didik untuk dapat mampu melakukan adaptasi dan melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan kehidupan, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya itu peserta didik juga mampu mengikuti perkembangan yang dibutuhkan dunia kerja yang disesuaikan dengan keahlian. Komponen ketiga, adalah komponen produktif. Komponen ini berisi kompetensi yang bertujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas dalam dunia kerja sesuai dengan program keahlian. Kompetensi-kompetensi yang dimuat dalam kurikulum, tidak sekedar merupakan program pendidikan dan isi pendidikan, namun memiliki konteks, paradigma, dan asumsi yang tersembunyi. Kompetensi berperan dalam melakukan hegemoni kekuasaan dalam proses produksi pengetahuan, sehingga siswa dibentuk sesuai dengan standarisasi yang akan dicapai oleh pendidikan kejuruan. Dalam kurikulum memiliki kecenderungan neoliberalisme, karena terlalu mengarahkan siswa menjadi pekerja yang profesional yang menyerahkan urusan politik kepada para pembuat kebijakan resmi (Dharma Kesuma, 2016). Wacana kompetensi sekolah kejuruan yang diajarkan di SMK berorientasi pada kepentingan pasar.

Kompetensi kurikulum dalam kurikulum merdeka telah jauh berubah dari capaian kompetensi dalam kurikulum lama. Pada struktur kurikulum merdeka untuk SMK berubah dalam mata pelajaran yang semula dikelompokkan dalam tiga kelompok (muatan nasional, wilayah, dan peminatan) sekarang disederhanakan menjadi dua kelompok (kelompok umum dan kejuruan). Dalam kelompok umum sendiri memuat mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, sesuai dengan perkembangan, yang berkaitan dengan norma-norma kehidupan, individu, sosial, dan warga maupun sebagai warga dunia. Kelompok kejuruan adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (Kemendikbud, 2022).

Saat ini pengetahuan dan otoritas dalam kurikulum sekolah diatur bukan untuk menghilangkan perbedaan tetapi untuk mengaturnya melalui pembagian kerja budaya dan sosial (Giroux H. A., 1994). Dalam wacana modernisme, pengetahuan menarik batas-batasnya hampir secara eksklusif dari model budaya dan menghubungkan pembelajaran dengan penguasaan badan-badan pengetahuan yang otonom dan terspesialisasi. Diinformasikan oleh tradisi modernis, sekolah menjadi agen dari teknologi politik dan intelektual yang terkait

dengan apa yang diatur oleh aparaturnya melalui praktik ketertiban yang memandang "kontingensi sebagai musuh dan ketertiban sebagai tugas" (Giroux H. A., 1994). Efeknya mencapai jauh ke dalam struktur sekolah umum, yakni keyakinan pada kepastian sanksi praktik pedagogis dan ruang publik di mana perbedaan budaya dipandang sebagai ancaman; pengetahuan menjadi diposisikan dalam kurikulum sebagai objek penguasaan dan kontrol; siswa individu diistimewakan sebagai sumber hak pilihan yang unik terlepas dari hubungan kekuasaan yang tidak adil; teknologi dan budaya buku diperlakukan sebagai perwujudan dari pendidikan tinggi modernis dan satu-satunya objek pedagogi yang sah (Giroux H. A., 1994).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran pembahasan mengenai *link and match* pendidikan pada sekolah kejuruan dan liberalism pendidikan berdasarkan data studi pustaka dan analisis wacana kritis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan sekolah kejuruan di Indonesia cenderung mengarah pada praktek liberalisasi pendidikan yang mendukung industri pasar kerja. Sistem pendidikan telah beralih menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar dan industri, meskipun tujuan baiknya kualitas sistem pendidikan ini dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi perkembangan dan kemakmuran ekonomi suatu negara (Martono, 2014). Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial untuk meningkatkan kemampuan analisis berpikir kritis. Kemampuan ini berperan sebagai cara menanamkan keyakinan dan nilai baru dalam nalar dan proses berpikir manusia. Pendidikan kritis diharapkan nantinya dapat menciptakan generasi yang baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, serta sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan tanggap terhadap perubahan yang ada (Freire, 2002). Pengaruh berpikir kritis juga diharapkan dapat memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial ekonomi. Oleh karena itu pengembangan berpikir kritis bukan yang efektif dalam pengembangan pribadi seperti sikap kritis. Namun yang jauh lebih penting adalah berpikir kritis dapat berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak politik, sosial, maupun ekonomi.

UCAPAN DAN TERIMAKASIH

Dalam tulisan artikel jurnal ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah S.W.T atas pekenannya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Lucia Ratih Kusumadewi, S.Sos., D.E.A. yang telah berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, S. (2017). SMK Pesantren: Sebuah Penelusuran Akar Ideologi Pendidikan. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 81–102.
- Arliman, L. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 333–339.
- Budiharto, B., Triyono, T., & Suparman, S. (2018). Literasi Sekolah Sebagai Upaya Penciptaan Masyarakat Pebelajar Yang Berdampak Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 5(2), 153–166.
- Darmadi, D. R. H., & Pd, M. (2019). *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi Dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi*. An1mage.
- Diana, D., Irawan, Y., & Meilvinasvita, D. (2019). User Survey Sebagai Upaya Membangun Link And Match

- 6590 *Liberalisme Pendidikan dan Wacana Link And Match Sekolah Kejuruan di Indonesia – Hayu Mentari Precalya*
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3310>
- Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit 2019, 1(1)*, 206–215.
- Disas, E. P. (2018). Link And Match Sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 18(2)*, 231–242. <https://doi.org/10.17509/Jpp.V18i2.12965>
- Hartutik, E., Muawanah, U., & Suswati, E. (2019). Perhitungan Biaya Pendidikan Per Peserta Didik Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing:(Studi Kasus Di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 Gondanglegi). *Media Mahardhika, 17(2)*, 289–311.
- Husein, M. T. (2019). Link And Match Pendidikan Sekolah Kejuruan. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 15(2)*.
- Johan, A. B., Slamet, P. H., & Widodo, W. (2019). Evaluation Of Education Implementation Of Link And Match Systems Of The Industrial And Vocational School In Yogyakarta Province. *Jurnal Taman Vokasi, 7(2)*, 216–224.
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kholifah, S., & Suyadnya, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Berbagi Pengalaman Dari Lapangan*.
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan Yang Berkebudayaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Martono, N. (2017). *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat: Dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, Dan Liberalisasi Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Precalya, H. M. (2021). Link & Match Pendidikan Sebagai Ideologi Neoliberalisme (Analisis Wacana Tentang Dominasi Elit Dalam Pendidikan Kejuruan Di Indonesia). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(4)*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2561>
- Putranto, I. (2017). Pengembangan Model Kerja Sama *Link And Match* Untuk Meningkatkan Kesiapan Kerja Bagi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Akuntansi Di Kota Semarang. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi, 1(1)*, 68–83. <https://doi.org/10.33753/Mandiri.V1i1.10>
- Rahardjo, M. (2018). *Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rosyid, M. Z., Mansyur, M., IP, S., & Abdullah, A. R. (2019). *Prestasi Belajar*. Literasi Nusantara.
- Safitri, R. I. A. W. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. *Avatara, 4(3)*.
- Sholikhati, N. I., & Mardikantoro, H. B. (2017). Analisis Tekstual Dalam Konstruksi Wacana Berita Korupsi Di Metro TV Dan NET Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 6(2)*, 123–129.
- Statistik, B. P. (2020). Indeks Pembangunan Manusia. *Retrieved Februari, 18*.
- Suyitno, M. P. (2020). *Pendidikan Vokasi Dan Kejuruan Strategi Dan Revitalisasi Abad 21*.
- Xu, X., & Kan, Y. (2013). Cross-Border Higher Education In China In The Globalized World: The Perspective Of The World Trade Organization's General Agreement On Trade In Services. *KEDI Journal Of Educational Policy, 10(2)*.
- Zulaeha, E. (2020). Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya-Karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 18(1)*, 25–48.